



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satriadi Gunawan

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

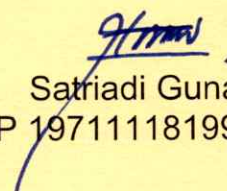
Jakarta, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA,
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta



Satriadi Gunawan
NIP 197111181991011001

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI TAHUN 2026

Nama : Satriadi Gunawan
NIP : 197111181991011001
Jabatan : Kepala Satpol Pp
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sistem Perencanaan Tahunan	Dasar Hukum : a. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal b. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Definisi : Persentase capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan melalui 4 tahapan : a. Pengumpulan data; b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 4 tahapan tersebut tertuang dalam Form 5.A.1 sampai Form 5.E.1 pada Sub Urusan Trantibum. Capaian SPM kemudian dibagi menjadi kategori Sangat Tinggi (85%-100%), Tinggi (75%-84%), Sedang (60%-74%), dan Rendah (0%-59%) Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum = Persentase capaian penegakan Perda/Perkada sesuai Mutu ditambah persentase pelayanan ganti rugi dibagi dua sesuai Form 5.E.1 pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Persentase capaian Penegakan	100	100	100	100	100	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Perda/Perkada sesuai Mutu = Jumlah Penegakan Perda/Perkada yang sesuai Mutu Layanan Dasar dibagi Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada dikali 100% Persentase Pelayanan Ganti Rugi = Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang terlayani dibagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapatkan Layanan						
Sasaran Relevan Lainnya										
2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	TLHP BPK	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005	25	25	25	25	100	Persen

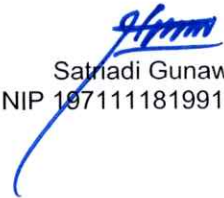
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)						
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Satnadi Gunawan
NIP 197111181991011001

RENCANA AKSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI 2026

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang diterapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
1	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Secara Humanis Dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	RA1. Melaksanakan Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KK1.1. Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi terkait Peta Rawan Gangguan Tramtibus	T/O1.1.1. Dokumen Perencanaan Sistem Informasi terkait Peta Rawan Gangguan Tramtibus	1 dokumen	TW III
						T/O1.1.2. Sistem Informasi terkait Peta Rawan Gangguan Tramtibus Dapat Berfungsi dan digunakan oleh seluruh Petugas Operasional	1 dokumen	TW IV
					KK1.2. Terlaksananya Inventarisasi dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Satpol PP	T/O1.2.1. Laporan Hasil Rapat Inventarisasi dan Evaluasi SOP Satpol PP	1 dokumen	TW I
						T/O1.2.2. Instruksi Kepala Satpol PP tentang Inventarisasi dan Evaluasi SOP Satpol PP kepada seluruh Unit Kerja	1 dokumen	TW II
						T/O1.2.3. RAB penganggaran untuk Kegiatan Penyusunan SOP Satpol PP untuk Tahun 2027	1 dokumen	TW III
					KK1.3. Tersusunnya Dokumen Kajian Strategis Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk Mendukung Jakarta Kota Global	T/O1.3.1. Dokumen Kerjasama Penyusunan Kajian Strategis Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk Mendukung Jakarta Kota Global untuk Optimalisasi Pemenuhan	1 dokumen	TW II

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Reaksi	Target Reaksi	Waktu
						Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
						T/O1.3.2. Kajian Strategis Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk Mendukung Jakarta Kota Global untuk Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	TW IV
						KK1.4. Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta	1 dokumen	TW II
						T/O1.4.2. Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta/Pembinaan Satlinmas Provinsi DKI Jakarta	1 dokumen	TW III
				RA2. Penetapan Program Strategis oleh Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	KK2.1. Ditetapkannya program strategis oleh seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan citra positif instansi di masyarakat	T/O2.1.1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait dengan Program Strategis oleh Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	1 dokumen	TW II

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditelapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						T/O2.1.2. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 dokumen	TW III
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	100	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	71	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	1 Data	TW I
				RA2. Menyusun AKB target bulanan dalam sistem sipkddki.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	T/O2.1.1. Data AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	1 Data	TW I
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi meliputi capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	KK3.1. Tersusunnya monitoring kinerja anggaran meliputi yaitu capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW I
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW II
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW III
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW IV
				RA4. Merealisasikan Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan	KK4.1. Tercapainya Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk	T/O4.1.1. Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat	80 Persen	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
				Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) paling sedikit 80%	TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ)		

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta



Satriadi Gunawan
NIP.197111181991011001